

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OLEH TPID KABUPATEN BONE PADA TAHUN 2023-2024

Muh. Rizal Saputra

Program Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin

Email: putrarizalmuhammad29@gmail.com

Abstract

This study analyzes the implementation of regional inflation-control policy by the Regional Inflation Control Team (TPID) of Bone Regency and identifies the factors supporting its performance in 2023-2024. A descriptive qualitative approach was employed through in-depth interviews, observation, and document analysis. Policy implementation was examined using the four pillars of regional inflation control: price affordability, supply availability, smooth distribution, and effective communication. Supporting factors were analyzed using Van Meter and Van Horn's policy implementation framework. The findings show that price affordability was pursued through the Low-Cost Food Movement and targeted market interventions; supply was strengthened through horticultural production and household food initiatives; distribution was supported by transport subsidies and the Mobile Distribution Center; and public communication relied on price monitoring, digital media, and interagency coordination. Implementation was reinforced by measurable policy targets, the mobilization of cross-agency resources, a collaborative implementing structure, and regular vertical and horizontal communication. Nevertheless, the limited number of informants means that the results should be understood as an institutional account rather than a comprehensive impact evaluation. The study concludes that Bone Regency's performance reflects effective multilevel policy coordination and locally adapted implementation in maintaining food-price stability.

Keywords: Policy Implementation, Regional Inflation, TPID, Food Price Stability.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bone serta mengidentifikasi faktor yang mendukung kinerjanya pada 2023-2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Implementasi kebijakan dianalisis berdasarkan empat pilar pengendalian inflasi daerah, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Faktor pendukung dianalisis dengan kerangka implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterjangkauan harga ditempuh melalui Gerakan Pangan Murah dan intervensi pasar yang terarah; ketersediaan pasokan diperkuat melalui produksi hortikultura dan pemanfaatan pekarangan; distribusi didukung subsidi angkutan serta Mobile Distribution Center; sedangkan komunikasi publik dijalankan melalui pemantauan harga, media digital, dan koordinasi antarinstansi. Pelaksanaan kebijakan ditopang oleh sasaran yang terukur, mobilisasi sumber daya lintas perangkat daerah, struktur pelaksana yang kolaboratif, serta komunikasi vertikal dan horizontal yang rutin. Namun, keterbatasan jumlah informan menjadikan temuan ini lebih tepat dibaca sebagai gambaran kelembagaan daripada evaluasi dampak yang menyeluruh. Penelitian menyimpulkan bahwa kinerja TPID Kabupaten Bone mencerminkan koordinasi kebijakan multilevel dan kemampuan adaptasi kebijakan terhadap persoalan harga pangan di tingkat lokal.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Inflasi Daerah, TPID, Stabilitas Harga Pangan

PENDAHULUAN

Inflasi menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan yang mengurangi daya beli masyarakat. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan stabilitas makroekonomi, tetapi juga dengan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan harga pangan dapat memperbesar kerentanan kemiskinan karena rumah tangga berpendapatan rendah mengalokasikan bagian pengeluaran yang lebih besar untuk pangan (Faharuddin et al., 2023). OECD (2024) juga menempatkan pengendalian inflasi sebagai unsur penting dalam menjaga daya beli dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pengendalian inflasi di Indonesia menghadapi variasi antardaerah akibat perbedaan struktur produksi, kondisi geografis, biaya logistik, dan gangguan distribusi. Kuncoro (2020) menunjukkan bahwa persistensi inflasi tidak seragam antarwilayah. Analisis spasial memperlihatkan adanya perbedaan pola dan keterkaitan inflasi antardaerah yang menuntut respons kebijakan berbasis karakter wilayah (Aginta, 2022, 2024). Guncangan besar juga dapat memengaruhi daerah dengan intensitas berbeda, sebagaimana terlihat selama pandemi COVID-19 (Nugraha et al., 2024). Pada kelompok pangan, produksi, nilai tukar, bencana, dan volatilitas harga produsen ikut membentuk tekanan inflasi (Priastiwi, 2025; Theresia et al., 2025).

Pada tingkat kelembagaan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi forum koordinasi yang mempertemukan pemerintah daerah, Bank Indonesia, instansi vertikal, BUMN pangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Purwono et al. (2020) menemukan bahwa program pengendalian inflasi daerah, pembangunan logistik, dan kerja sama rantai pasok antardaerah berperan dalam mendorong konvergensi inflasi di Indonesia. Temuan tersebut menegaskan bahwa kebijakan moneter perlu ditopang oleh

intervensi sisi penawaran yang mencakup produksi pangan, ketersediaan stok, distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi publik.

Urgensi koordinasi tersebut terlihat pada perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK). BPS mencatat inflasi nasional Desember 2024 sebesar 1,57 persen secara year-on-year (Badan Pusat Statistik, 2025), sedangkan BPS Kabupaten Bone (2025) mencatat perkembangan IHK Watampone sebagai konteks tekanan harga lokal. Stabilitas nasional tidak menghapus kemungkinan gejolak pada komoditas tertentu di daerah. Karena itu, kerangka 4K - keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif - relevan untuk membaca keterpaduan kebijakan. Tata kelola pangan membutuhkan integrasi produksi, distribusi, dan akses masyarakat (Moragues-Faus et al., 2017), sedangkan ketahanan pangan menuntut kemampuan sistem untuk menyerap gangguan, beradaptasi, dan mempertahankan fungsinya (Zurek et al., 2022; Béné et al., 2023; Ujjwal KC et al., 2024).

Kabupaten Bone merupakan kasus yang menarik karena TPID daerah ini memperoleh penghargaan nasional untuk wilayah Sulawesi pada 2023 dan 2024. Capaian tersebut menunjukkan adanya kinerja kelembagaan yang perlu ditelaah di balik indikator penghargaan, terutama cara program dirancang, sumber daya dimobilisasi, dan koordinasi dijalankan. Namun, penelitian terdahulu lebih banyak menganalisis konvergensi, persistensi, dan penyebaran inflasi secara kuantitatif, sedangkan kajian yang menjelaskan proses implementasi TPID pada tingkat kabupaten masih terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengendalian inflasi TPID Kabupaten Bone melalui empat pilar 4K serta mengidentifikasi faktor pendukungnya berdasarkan dimensi model Van Meter dan Van Horn. Fokus penelitian diarahkan pada

proses dan tata kelola implementasi, bukan pada pengujian hubungan kausal antara program TPID dan perubahan angka inflasi. Literatur mutakhir menegaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, sumber daya, karakter pelaksana, koordinasi, dan konteks kebijakan (Kurahyadi, 2023), serta membutuhkan pemahaman mengenai interaksi aktor dan penggunaan pengetahuan dalam pelaksanaannya (Bullock et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami proses implementasi kebijakan secara kontekstual. Pendekatan ini sesuai untuk menelusuri makna, praktik kelembagaan, dan hubungan antarpelaksana yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui ukuran numerik (Fadli, 2021). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bone dengan unit analisis TPID Kabupaten Bone dan program pengendalian inflasi pada 2023-2024. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatannya dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, yaitu Sekretaris TPID Kabupaten Bone pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah sebagai informan kunci dan perwakilan Dinas Ketahanan Pangan sebagai informan pendukung. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder bersumber dari laporan kegiatan, data harga, keputusan kepala daerah, perjanjian kerja sama, dan dokumen koordinasi TPID. Analisis implementasi menggunakan empat pilar pengendalian inflasi daerah: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Faktor pendukung dianalisis melalui empat dimensi model Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, serta komunikasi antarorganisasi. Penggunaan model tersebut merujuk pada pembahasan

kontemporer mengenai variabel penentu implementasi kebijakan (Kurahyadi, 2023). Data dianalisis secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi; tahapan tersebut memungkinkan peneliti menilai konsistensi pola temuan selama proses analisis (Rijali, 2018). Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Keterbatasan penelitian terletak pada jumlah informan yang terbatas, sehingga hasilnya merepresentasikan perspektif kelembagaan pelaksana dan belum mencakup penilaian pedagang, petani, maupun rumah tangga penerima manfaat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bone diwujudkan melalui penerjemahan operasional strategi empat pilar (4K) secara adaptif. Strategi kolaboratif lintas sektor ini diarahkan untuk memitigasi risiko lonjakan harga kebutuhan pokok di pasar. Keempat pilar tersebut menunjukkan penggunaan beberapa instrumen secara terpadu, sejalan dengan kebutuhan integrasi lintas sektor dalam tata kelola pangan (Candel, 2014). Implementasinya di Kabupaten Bone dijabarkan sebagai berikut; keterjangkauan harga, merupakan pilar pertama pengendalian inflasi yang diarahkan untuk menjaga agar daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok tetap stabil, khususnya saat menghadapi tekanan musiman seperti momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Strategi utama yang dijalankan adalah intervensi pasar secara masif melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan melibatkan Perum BULOG, Kelompok Wanita Tani (KWT), koperasi, dan pelaku UMKM binaan Dinas Perindustrian. Penentuan titik intervensi di lapangan bersifat fleksibel dan didasarkan

pada data harian riil yang dikumpulkan oleh Tim Pemantau Harga Pasar serta data berbasis digital melalui Sistem Pemantauan Harga Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kementerian Perdagangan. Selama tahun 2023, intervensi pasar dilaksanakan sebanyak 38 kali kegiatan, sementara pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 23 kali kegiatan. Kegiatan GPM tersebut tersebar secara spasial di berbagai titik strategis seperti Lapangan Merdeka Watampone, Pasar Cina, Pasar Bajoe, Pasar Arasoe, Pasar Taccipi, hingga kompleks pemukiman padat. Untuk menopang pelaksanaan GPM, dialokasikan anggaran dari kombinasi Belanja Tidak Terduga (BTT), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp273.744.400. Guna memperluas cakupan jaminan komoditas protein, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga mengikat hubungan hukum formal melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pedagang lokal untuk menyuplai telur dan daging ayam dengan harga terstandar.

Pilar kedua, ketersediaan pasokan; TPID Kabupaten Bone tidak hanya menerapkan kebijakan yang bersifat reaktif di hilir, melainkan memperkuat ketahanan pangan daerah dari sektor hulu melalui kapasitas produksi lokal. Salah satu inovasi struktural utamanya adalah pembentukan Program Kampung Hortikultura. Melalui pemetaan geografis, program ini menetapkan komoditas unggulan di 16 kecamatan, seperti Kecamatan Barebbo sebagai sentra cabai dan tomat, serta Kecamatan Ajangale untuk pengembangan bawang merah. Guna mendukung infrastruktur pertanian, pemerintah daerah menjalin kemitraan dengan TNI AD Batalion Armed 21/105 Tarik Kawali dalam pembukaan lahan dan dukungan alat mekanis di Kecamatan Bengo. Pemerintah mengalokasikan DID sebesar Rp733.027.000 untuk pengadaan pupuk, bibit hortikultura, dan benih sayuran. Bantuan ini dikawal ketat lewat instrumen formal berupa SK Bupati

mengenai alokasi pupuk bersubsidi guna menekan biaya operasional penggarap. Di tingkat rumah tangga, strategi ketersediaan pasokan diperkuat melalui program "Puspa Harapan" (Pusat Pangan Sehat, Beragam, Pasti Aman) yang berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK di 17 kecamatan untuk mengedukasi masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai kebun gizi keluarga. Strategi mikro ini didukung pula oleh Surat Edaran Bupati Bone No. 188.6/1454/Ekon yang menginstruksikan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN menanam minimal 10 pot pohon cabai di pekarangan rumah guna meredam permintaan pasar saat terjadi volatilitas harga. Penguatan produksi lokal dan pemanfaatan pekarangan menunjukkan upaya membangun kapasitas adaptif sistem pangan, yaitu kemampuan mempertahankan fungsi pasokan ketika menghadapi gangguan (Zurek et al., 2022). Pengalaman kawasan Asia juga menunjukkan bahwa diversifikasi produksi, konektivitas rantai pasok, dan koordinasi publik memperkuat daya lenting pangan ketika terjadi krisis (Fan et al., 2021). Diversifikasi produksi dan penguatan kapasitas lokal tersebut juga memperkuat ketahanan sistem pangan melalui kemampuan bertahan, beradaptasi, dan bertransformasi ketika menghadapi gangguan (Ujjwal KC et al., 2024).

Pilar ketiga, kelancaran distribusi. Kondisi geografis Kabupaten Bone yang luas dengan aksesibilitas kecamatan yang beragam menuntut tata kelola logistik yang efisien. Oleh karena itu, dalam struktur kelembagaan TPID sengaja dimasukkan dinas infrastruktur seperti Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) serta Dinas Sumber Daya Air guna menjaga aksesibilitas jalan logistik dan jaringan irigasi produksi. Instrumen intervensi fiskal daerah yang diterapkan adalah pemberian subsidi biaya transportasi logistik bahan pangan pokok melalui Dinas Perhubungan. Subsidi ini

menyasar armada pengangkut bahan pokok pangan dari gudang BULOG ke wilayah terpencil. Berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan dan Perikanan, diberikan subsidi BBM senilai Rp300.000 per orang bagi 500 penerima manfaat pedagang keliling ikan/sayur (Pa'Gandeng) dan bantuan BTT bagi 460 pedagang tradisional (Pa'Jujung Bale) dengan total alokasi gabungan Rp290.000.000. Selain skema subsidi, kelancaran distribusi juga dioptimalkan melalui Mobile Distribution Center (MDC) yang dikelola bersama Perum BULOG untuk memotong rantai pasok dengan mengirim komoditas pangan murah langsung ke titik konsumen di pasar kecamatan. Dampak nyata dari intervensi distribusi ini tecermin dari data SP2KP tahun 2024, di mana harga komoditas beras medium yang sempat menyentuh Rp14.000/Kg pada triwulan I berhasil diturunkan dan stabil di angka Rp13.000/Kg sejak bulan Juni hingga Desember setelah rentetan intervensi logistik dijalankan. Di level pedesaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai simpul distribusi logistik pangan lokal (last-mile delivery). Temuan ini menguatkan argumentasi Purwono et al. (2020) bahwa infrastruktur logistik dan koordinasi rantai pasok merupakan unsur penting pengendalian disparitas inflasi antardaerah.

Pilar keempat, komunikasi efektif; dijalankan untuk mengendalikan aspek psikologis pasar, membentuk ekspektasi harga, serta mengantisipasi perilaku pembelian panik (panic buying). Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) bertindak sebagai poros utama dalam menyebarkan infografis digital, perkembangan harga harian pasar, serta jadwal pelaksanaan pasar murah melalui media sosial resmi seperti Instagram, Facebook, dan jaringan grup WhatsApp komunitas RT/RW. Di samping komunikasi eksternal kepada publik, komunikasi internal

antarinstansi diwujudkan secara konsisten melalui pelaksanaan rapat koordinasi mingguan setiap hari Senin bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual, serta forum High Level Meeting (HLM) bersama jajaran Forkopimda dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Kehadiran pimpinan daerah secara simbolik di lokasi pasar murah juga berfungsi sebagai bentuk komunikasi kebijakan untuk meyakinkan masyarakat bahwa stok pangan daerah dalam kondisi aman.

Mengevaluasi faktor pendukung keberhasilan TPID Kabupaten Bone dalam meraih penghargaan nasional terbaik wilayah Sulawesi tahun 2023 dan 2024, analisis kebijakan dijabarkan melalui empat variabel utama yang diadaptasi dari model implementasi Van Meter dan Van Horn sebagaimana dirangkum dalam kajian implementasi kebijakan mutakhir (Kurahyadi, 2023). Model tersebut menempatkan kejelasan standar, sumber daya, karakteristik pelaksana, dan komunikasi sebagai bagian penting yang memengaruhi kinerja implementasi. Variabel pertama; standar dan sasaran kebijakan, keberhasilan implementasi ditopang oleh kejelasan ukuran normatif, di mana target makro nasional (seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi) diterjemahkan secara konsisten menjadi sasaran operasional lokal. Melalui dua payung hukum daerah, yaitu SK Bupati Bone No. 447 Tahun 2023 dan No. 155 Tahun 2024, standar keberhasilan ditentukan secara terukur melalui jumlah luaran kegiatan (GPM) dan pengawasan terhadap kepatuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasar. Sasaran kebijakan ini bersifat fleksibel, di mana jadwal dan titik intervensi langsung disesuaikan secara dinamis mengikuti deteksi dini anomali harga pada sistem SP2KP. Pada periode yang sama, inflasi IHK Watampone berubah dari 5,52% pada 2022 menjadi 2,84% pada akhir 2023; perubahan ini menjadi konteks kinerja,

tetapi tidak serta-merta membuktikan hubungan kausal dengan satu program tertentu.

Variabel kedua, dukungan sumber daya manusia, meskipun secara kelembagaan TPID tidak memiliki alokasi anggaran mandiri khusus dari pusat, keberhasilan program dicapai berkat kemampuan mobilisasi sumber daya lintas instansi secara integratif. Setiap OPD menyerap pembiayaan program pengendalian harga melalui pos anggaran dinas masing-masing menggunakan kombinasi APBD, DID, DAK, dan instrumen Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kondisi kedaruratan pasokan. Sumber daya data berupa instrumen SP2KP serta armada teknis seperti kendaraan logistik MDC milik BULOG dimanfaatkan optimal sebagai prasarana pendukung pergerakan logistik pangan.

Variabel ketiga, karakteristik organisasi pelaksana, struktur organisasi pelaksana TPID Kabupaten Bone bersifat inklusif, fungsional, dan nonhierarkis. Organisasi ini menggabungkan 18 OPD teknis, instansi vertikal (Kementerian Agama, KPPN), aparat penegak hukum (Polres, Kodim, Kejaksaan) selaku unsur pengarah keamanan distribusi, serta BUMN (Perum BULOG) dan otoritas moneter (Bank Indonesia). Karakteristik birokrasi yang kolaboratif ini berjalan lincah karena dikomandani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian dan Bagian Perekonomian Setda selaku Sekretariat tetap yang mengontrol pelaporan triwulanan secara ketat, sehingga ego sektoral antar-dinas dapat diminimalkan demi tercapainya target stabilitas harga daerah.

Variabel keempat, komunikasi antarorganisasi pelaksana, alur pesan dan kejelasan instruksi kebijakan berjalan intensif secara vertikal maupun horizontal. Komunikasi horizontal antar-OPD berjalan dinamis melalui forum rapat teknis prapelaksanaan kegiatan untuk menyinkronkan data pasokan dari Dinas Pertanian, data harga dari Dinas Perdagangan,

dan kesiapan moda distribusi dari Dinas Perhubungan. Secara vertikal, komunikasi dengan pemerintah provinsi serta Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) terinstitusionalisasi melalui kewajiban penyusunan laporan triwulanan serta forum evaluasi mingguan Kemendagri. Transparansi alur data koordinasi inilah yang menjamin ketepatan waktu (timing) pengambilan keputusan di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pengendalian inflasi oleh TPID Kabupaten Bone pada 2023-2024 berlangsung melalui integrasi empat pilar pengendalian inflasi daerah. Keterjangkauan harga dijalankan melalui Gerakan Pangan Murah dan intervensi pasar; ketersediaan pasokan diperkuat melalui program hortikultura dan pemanfaatan pekarangan; kelancaran distribusi didukung subsidi angkutan dan Mobile Distribution Center; sedangkan komunikasi efektif dilakukan melalui pemantauan harga, media digital, rapat koordinasi, dan forum lintas instansi. Pelaksanaan tersebut ditopang oleh sasaran program yang relatif jelas, mobilisasi anggaran dan fasilitas lintas organisasi, struktur pelaksana yang kolaboratif, serta komunikasi vertikal dan horizontal yang rutin. Temuan ini menunjukkan kapasitas TPID dalam menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam intervensi yang sesuai dengan persoalan pasokan dan distribusi lokal. Namun, perubahan angka inflasi tidak dapat diatribusikan hanya kepada program TPID karena penelitian ini tidak menggunakan desain evaluasi dampak dan belum memasukkan perspektif kelompok penerima manfaat.

Penelitian selanjutnya perlu memperluas informan dengan melibatkan pedagang, petani, distributor, dan rumah tangga, serta menggunakan perbandingan antarwilayah atau antarperiode. Penggabungan data kualitatif dengan data harga dan pasokan

berkala juga diperlukan untuk menilai hubungan antara waktu intervensi dan perubahan harga secara lebih meyakinkan. Kajian khusus mengenai BUMDes sebagai simpul distribusi pangan atau mengenai jaringan kebijakan TPID dapat memperdalam pemahaman tentang keberlanjutan koordinasi antarpelaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Faharuddin, F., Yamin, M., Mulyana, A., & Yunita, Y. (2023). Impact of food price increases on poverty in Indonesia: Empirical evidence from cross-sectional data. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 30(2), 126-142. <https://doi.org/10.1108/JABES-06-2021-0066>
- OECD. (2024). *OECD Economic Surveys: Indonesia 2024*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/de87555a-en>
- Kuncoro, H. (2020). Regional inflation dynamics and its persistence: The case of selected regions in Indonesia. *Regional Statistics*, 10(2), 95-115. <https://doi.org/10.15196/RS100211>
- Aginta, H. (2022). Spatiotemporal analysis of regional inflation in an emerging country: The case of Indonesia. *Regional Science Policy & Practice*, 14(3), 667-688. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12539>
- Aginta, H. (2024). Inflation and spatial spillovers in a large archipelago: Evidence from Indonesia. *Economic Papers*, 43(1), 91-103. <https://doi.org/10.1111/1759-3441.12381>
- Nugraha, I. R., Sahadewo, G. A., & Setiastuti, S. U. (2024). The impact of the COVID-19 pandemic on regional inflation in Indonesia. *Studies in Economics and Finance*, 41(4), 775-795. <https://doi.org/10.1108/SEF-12-2022-0550>
- Priastiwi, D. (2025). Factors influencing Indonesia's food inflation: An ARDL approach, 2020-2024. *Jurnal Economic Resource*, 8(1), 394-402. <https://doi.org/10.57178/jer.v8i1.1408>
- Theresia, A., Ikhsan, M., Kacaribu, F. N., & Sumarto, S. (2025). Spillover effect of food producer price volatility in Indonesia. *Economies*, 13(9), 256. <https://doi.org/10.3390/economies13090256>
- Purwono, R., Yasin, M. Z., & Mubin, M. K. (2020). Explaining regional inflation programmes in Indonesia: Does inflation rate converge? *Economic Change and Restructuring*, 53(4), 571-590. <https://doi.org/10.1007/s10644-020-09264-x>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2024*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/02/2397/pada-desember-2024-inflasi-year-on-year--y-on-y--adalah-sebesar-1-57-persen-.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. (2025). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Watampone Desember 2024*. <https://bonekab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/02/165/pada-desember-2024-di-watampone-mengalami-inflasi-sebesar-0-22-persen.html>
- Moragues-Faus, A., Sonnino, R., & Marsden, T. (2017). Exploring European food system vulnerabilities: Towards integrated food security governance. *Environmental Science & Policy*, 75, 184-215. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.05.015>
- Zurek, M., Ingram, J., Sanderson Bellamy, A., Goold, C., Lyon, C., Alexander, P., et al. (2022). Food system resilience:

- Concepts, issues, and challenges. *Annual Review of Environment and Resources*, 47, 511-534. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-112320-050744>
- Béné, C., Frankenberger, T. R., Nelson, S., Conostas, M. A., Collins, G., Langworthy, M., & Fox, K. (2023). Food system resilience measurement: Principles, framework and caveats. *Food Security*, 15(6), 1437-1458. <https://doi.org/10.1007/s12571-023-01407-y>
- Ujjwal KC, Campbell-Ross, H., Godde, C., Friedman, R., Lim-Camacho, L., & Crimp, S. (2024). A systematic review of the evolution of food system resilience assessment. *Global Food Security*, 40, 100744. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2024.100744>
- Kurhayadi. (2023). Public policy implementation: A theoretical review. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(1), 10-18. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i1.23742>
- Bullock, H. L., Lavis, J. N., Wilson, M. G., Mulvale, G., & Miatello, A. (2021). Understanding the implementation of evidence-informed policies and practices from a policy perspective: A critical interpretive synthesis. *Implementation Science*, 16, 18. <https://doi.org/10.1186/s13012-021-01082-7>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Fan, S., Teng, P., Chew, P., Smith, G., & Copeland, L. (2021). Food system resilience and COVID-19: Lessons from the Asian experience. *Global Food Security*, 28, 100501. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100501>